



Persepsi Mahasiswa Pasca Sarjana Unimed Terkait Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur

Ira Safitri¹⁾, Sulastris Krisdayanti Sinambela²⁾, Muthia Ivana Zahra³⁾,
Feby Adelia Parhusip⁴⁾, Julia Ivanna⁵⁾

Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

irasafitri922@gmail.com¹⁾
sulassinambela@gmail.com²⁾
muthia.zahra1606@gmail.com³⁾
febyadelia231@gmail.com⁴⁾
juliaivanna@unimed.ac.id⁵⁾

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Mahasiswa Pasca Sarjana Unimed terkait kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui instrumen penelitian berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini ialah reduksi data, display data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi Mahasiswa Pasca Sarjana Unimed terkait kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur terdiri dari penerimaan dan penolakan. Penerimaan dikarenakan beberapa alasan yaitu: Ibu Kota Jakarta saat ini telah memiliki segudang permasalahan, pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur dapat menjadi alternatif pemerataan penduduk, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur memberikan peluang besar dalam pengembangan berbagai program. Sedangkan penolakan dikarenakan oleh beberapa alasan yakni: pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur menimbulkan beban biaya yang cukup besar, pentingnya menyelesaikan permasalahan di Ibu Kota Jakarta tanpa pindah ke Kalimantan Timur, dan sulitnya akses menuju rumah sakit.

Kata kunci: Mahasiswa Pasca Sarjana, Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Persepsi

Abstract

The aim of this research is to determine the perceptions of Unimed Postgraduate Students regarding development policies for the Indonesian Capital City in East Kalimantan. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach, through research instruments in the form of interviews and documentation. The data analysis techniques in this research are data reduction, data display, and data verification. The results of the research show that the perceptions of Unimed Postgraduate Students regarding development policies for the Indonesian Capital City in East Kalimantan consist of acceptance and rejection. Acceptance is due to several reasons, namely: the capital city of Jakarta currently has a multitude of problems, the development of an archipelago capital city in East Kalimantan can be an alternative for population distribution, and the development of an archipelago capital city in East Kalimantan provides great opportunities for developing various programs. Meanwhile, the rejection was due to several reasons, namely: the construction of the capital city of the archipelago in East Kalimantan creates quite a large cost burden, the importance of solving problems in the capital city of Jakarta without moving to East Kalimantan, and the difficulty of access to hospitals

Keywords: Post Graduate Students, Capital Development of The Archipelago, Perception.



PENDAHULUAN

Ibu kota adalah wilayah yang paling strategis dalam suatu negara. Hal ini dikarenakan ibu kota adalah pusat sentral berbagai aktivitas kenegaraan. Karena kedudukannya yang begitu strategis dan menjadi nadi bagi kelangsungan kehidupan negara, ibu kota selalu mengalami perkembangan setiap periodenya dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemajuan dan pemenuhan kebutuhan negara. Kebijakan pemerintah terhadap ibu kota negara Indonesia yang paling mengejutkan masyarakat ialah pemindahan ibu kota negara Indonesia dari wilayah Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur.

Kebijakan perpindahan ibu kota negara Indonesia dari wilayah Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Pada Undang-Undang ini, ibu kota diberi nama Nusantara. Sehingga nama ibu kota untuk Indonesia adalah Ibu Kota Nusantara. Dalam Undang-Undang ini, Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 yaitu untuk: “menjadi kota berkelanjutan di dunia, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan menjadi identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melihat dari visi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, hal yang diinginkan atas kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur adalah tanggapan positif atau baik dari masyarakat Indonesia. Akan tetapi, pada realitanya tidak semua masyarakat Indonesia menyambut baik dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya penolakan yang dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari website resmi hukumonline.com yang dirilis pada 20 Januari 2022 dengan penulisnya Agus Sahbani disebutkan bahwa sejumlah masyarakat menentang pembentukan Ibu Kota baru ini karena dapat membahayakan keselamatan masyarakat (Sahbani, 2022). Lebih lanjut pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sumarna dan Lina Miftahul Jannah mengenai “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Provinsi Kalimantan Timur Dengan Pendekatan Swot *Analysis* (Studi pada Instansi Pemerintah Indonesia) tahun 2023 dinyatakan bahwa instansi pemerintah menolak kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Banyak anggota Aparat Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menolak atau tidak setuju ketika mereka ditugaskan di Provinsi Kalimantan Timur (Sumarna & Jannah, 2023).

Instansi pemerintah tersebut menolak untuk dipindah tugaskan karena keluarga telah tinggal di DKI Jakarta dan sekitarnya, sehingga akan mengalami kesulitan jika dipindahkan tugas ke Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga dengan demikian, dapat diketahui bahwa tidak hanya masyarakat yang melakukan penolakan atau tidak setuju dengan kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, namun instansi pemerintah tertentu juga melakukan penolakan atas kebijakan tersebut. Selain persepsi masyarakat dan instansi pemerintahan yang penting untuk diketahui terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, persepsi mahasiswa juga perlu untuk diketahui. Hal ini dikarenakan mahasiswa sebagai akademisi sekaligus sebagai pengawas sosial (*social control*), memiliki peran untuk mengawasi dan memberikan pandangan atau perspektif terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur dilandasi dengan keilmuan yang dimiliki (Jannah & Ani, 2021)s. Untuk itu, menarik dibahas mengenai” Persepsi Mahasiswa Pasca Sarjana Unimed Terkait Kebijakan Pembangunan Ibu Kota



Nusantara di Kalimantan Timur”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang lebih menekankan pemahaman mendalam terhadap suatu masalah daripada menggeneralisasikan masalah (Rusandi & Rusli, 2021). Pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang digunakan dalam metode kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan suatu hal. Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Pasca Sarjana Unimed yang berjumlah 10 orang, yang diwawancarai pada tanggal 03 Mei 2024 dan 08 Mei 2024 di Gedung Pasca Sarjana Unimed. Selain itu, referensi seperti Undang-Undang, artikel jurnal, dan informasi dari internet digunakan sebagai sumber tertulis untuk dijadikan sebagai dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman yaitu mencakup reduksi data, display data, dan verifikasi data (Rijali, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur menimbulkan dua persepsi berbeda di kalangan Mahasiswa Pasca Sarjana Unimed. Dua persepsi berbeda yang dimaksud ialah penerimaan dan penolakan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Penerimaan yang dilakukan oleh mahasiswa Pasca Sarjana Unimed terkait kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur dikarenakan oleh beberapa alasan yaitu sebagai berikut.

1. Ibu Kota Jakarta telah memiliki segudang permasalahan

Ibu Kota Jakarta saat ini telah memiliki segudang permasalahan yang rumit di antaranya permasalahan dalam tata kelola wilayah, permasalahan padatnya jumlah penduduk, permasalahan pencemaran udara, dan permasalahan ekologi atau lingkungan. Dengan adanya berbagai permasalahan ini, kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur diharapkan dapat menjadi harapan baru untuk menjadi ibu kota negara yang lebih baik dan dapat meminimalisir berbagai permasalahan tersebut.

2. Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur dapat menjadi alternatif pemerataan penduduk

Wilayah Jakarta saat ini sudah mengalami kepadatan jumlah penduduk. Kepadatan jumlah penduduk menyebabkan banyak jumlah sampah domestik yang dihasilkan dan pada akhirnya mencemari lingkungan sekitar terutama bantaran sungai. Sehingga tidak heran saat hujan turun dengan intensitas yang tinggi, maka Jakarta akan banjir. Sebagai suatu ibu kota, kondisi Jakarta yang selalu banjir akan menyebabkan kurang efektifnya kegiatan kehidupan sehari-hari masyarakat dan berbagai aktivitas kenegaraan. Sehingga dengan hal yang demikian, pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur dapat menjadi alternatif pemerataan penduduk dan meminimalisir untuk terjadinya banjir.

3. Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur memberikan peluang besar dalam pengembangan berbagai program

Salah satu pengembangan program yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur ialah adanya transportasi cerdas (*smart transportation*) (Saraswati & Adi, 2022). Ibu Kota Nusantara akan



didukung oleh sistem transportasi pintar, yang merupakan sistem transportasi kota yang dirancang untuk mengintegrasikan pengembangan transportasi publik, sepeda, dan lainnya. Ini dirancang dengan menerapkan sistem informasi terintegrasi sistem transportasi pintar, dan jaringan transportasi publik inovatif, serta mendorong penggunaan kendaraan listrik yang hemat bahan bakar dan ramah lingkungan.

Beberapa alasan yang telah disebutkan di atas tentunya harus didukung dengan persiapan yang benar-benar matang, sistematis, dan diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga dengan demikian, menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk lebih ekstra dalam melaksanakan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur dan berpedoman pada peraturan yang telah mengatur pembangunan Ibu Kota Nusantara tersebut. Pemerintah tidak harus hanya membuat kebijakan, tetapi juga berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan dan melakukan pengawasan di lapangan.

Selain penerimaan terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, terdapat beberapa penolakan dari Mahasiswa Pasca Sarjana Unimed terhadap pembangunan tersebut. Penolakan tersebut tidak semata-mata dilakukan, namun ada beberapa alasan yang turut menyertai. Adapun alasan-alasan tersebut ialah sebagai berikut.

1. Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur menimbulkan beban biaya (*cost*) yang cukup besar

Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur menimbulkan biaya (*cost*) yang cukup besar. Hal ini timbul dikarenakan dalam melakukan proses pemindahan terutama proses pemindahan masyarakat sebagai ASN dan juga pejabat-pejabat pemerintah yang akan melakukan pengabdian Negara disana memerlukan biaya yang besar dimulai dari biaya transportasi, penyesuaian terhadap biaya kebutuhan di wilayah baru, hingga kepada biaya yang lain-lainnya yang dapat dilihat secara rinci dalam APBN Negara. Untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan akan sangat mahal. Pemerintah telah menetapkan anggaran sebesar 466 triliun hingga 486 triliun untuk pembangunan ibu kota baru hingga tahun 2024 (Pambudhi, 2024). Angka tersebut mengindikasikan bahwa beban biaya yang digunakan dalam pembangunan tersebut sangatlah besar.

2. Pentingnya menyelesaikan permasalahan di Ibu Kota Jakarta tanpa pindah ke Kalimantan Timur

Terdapat hal penting (*urgent*) lainnya yang perlu diperhatikan dan diselesaikan oleh Negara selain melakukan pemindahan ibu kota ini. Hal tersebut ialah upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang ada di Ibu Kota Jakarta seperti masalah kemiskinan, permukiman kumuh, banjir, dan masalah lainnya agar permasalahan tersebut berjalan lebih baik dan Jakarta tetap layak menjadi ibu kota dibandingkan harus memindahkan berbagai fasilitas dan juga kepentingan-kepentingan umum Negara ke wilayah Kalimantan Timur, untuk dijadikan ibu kota baru.

3. Sulitnya akses menuju rumah sakit

Beberapa wilayah di Kalimantan Timur masih memiliki akses jalan yang tidak baik. Adapun beberapa wilayah tersebut adalah Desa Lemper, Deraya, Tanjung Soke, dan Gerunggung (Fauziah, 2023). Keempat desa ini saat hujan lebat, akses menuju tempat tersebut sangat licin dan berbahaya untuk dilalui dan memakan



waktu lama untuk sampai ke lokasi tujuan. Kesulitan akses ini dikhawatirkan akan dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan dari masyarakat yang tinggal di sana. Sehingga dengan demikian, perlu pertimbangan yang matang dan bijaksana dalam memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Berdasarkan beberapa alasan penolakan di atas, dapat diketahui bahwasannya penolakan tersebut dikarenakan masih adanya aktivitas-aktivitas yang dianggap sebagai kerugian apabila Ibu Kota Indonesia yang awalnya berdomisili di Jakarta akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Sebab memindahkan Ibu Kota Negara bukanlah hal yang mudah dan pasti ada resiko yang akan dihadapi.

SIMPULAN DAN SARAN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Pembangunan Ibu Kota Nusantara ini memberikan persepsi yang berbeda di kalangan masyarakat Indonesia termasuk Mahasiswa Pasca Sarjana Unimed. Perbedaan persepsi tersebut terdiri atas penerimaan dan penolakan. Penerimaan dikarenakan oleh beberapa alasan yaitu: Ibu Kota Jakarta saat ini telah memiliki segudang permasalahan, pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur dapat menjadi alternatif pemerataan penduduk, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur memberikan peluang besar dalam pengembangan berbagai program. Sedangkan penolakan dikarenakan oleh beberapa alasan yakni: pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur menimbulkan beban biaya (*cost*) yang cukup besar, pentingnya menyelesaikan permasalahan di Ibu Kota Jakarta tanpa pindah ke Kalimantan Timur, dan sulitnya akses menuju rumah sakit.

Berdasarkan beberapa alasan yang telah disebutkan di atas jelas terlihat bahwa setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur tidak selamanya mendapatkan penerimaan, namun juga penolakan. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa setiap kebijakan pasti ada dampak baik dan buruknya sehingga secara otomatis penerimaan dan penolakan pasti ada. Walaupun demikian, karena pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur telah dilakukan maka penerimaan terhadap pembangunan tersebut lebih diutamakan dengan disertai keterlibatan semua masyarakat Indonesia termasuk mahasiswa. Mahasiswa disarankan dapat menjadi pengawas sosial terhadap kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur yang sedang berlangsung saat ini. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui media sosial yang memberikan informasi terkait perkembangan dari pembangunan ibu kota tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah, Y. F. (2023). *Warga di Empat Desa Sulit Dapat Pelayanan Kesehatan*. BeritaBorneo. <https://beritaborneo.com/main/2023/04/03/warga-di-empat-desa-sulit-dapat-pelayanan-kesehatan/>
- Jannah, F., & Ani, S. (2021). Perspektif Mahasiswa Sebagai Agen of Change Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Journal of Social Science and Education*, 2(2), 181–193. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/asanka/article/view/3193>
- Pambudhi, N. A. (2024). Analisis Pembangunan Ibukota Negara Baru dan Dampaknya Terhadap Anggaran Pertahanan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 70–79. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5992>



- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 1–13. <https://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi/article/view/18>
- Sahbani, A. (2022). *Beragam Alasan Penolakan Atas Pengesahan UU IKN*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/beragam-alasan-penolakan-atas-pengesahan-uu-ikn-lt61e84a9e80b74>
- Saraswati, M. K., & Adi, E. A. W. (2022). Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis Swot. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(2), 4042–4052. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/3086/0>
- Sumarna, & Jannah, L. M. (2023). Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Provinsi Kalimantan Timur Dengan Pendekatan Swot Analysis (Studi pada Instansi Pemerintah Indonesia). *Jurnal Academia Praja*, 6(1), 185–202. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja/article/view/1493>